

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rezim otoriter telah runtuh sejak reformasi 1998 lalu. Demokratisasi yang dijalankan. Kini telah berjalan baik di Indonesia. Terutama, dalam memilih pemimpin. Masyarakat dapat memilih calon pemimpin sendiri sesuai suara hati, tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Pemimpin tidak lagi berdasarkan keturunan.

Proses pemilihan dari masyarakat ini diyakini menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan milik semua orang, bukan pemerintahan satu orang (*autocracy*). Jalan pemerintahannya juga diharapkan lebih terbuka, lebih responsif, dan melaksanakan aspirasi masyarakat. Nantinya dapat mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penerapan sistem ini akan membuat masyarakat mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Posisi yang tinggi menurut Alcein “*vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan)”, sedangkan menurut Machiavelli “*publica voce*”.¹ Suara rakyat bisa dalam bentuk memberikan aspirasi, masukan atau kritik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat ini diawali dari memilih calon pemimpin. Pemilihan ini seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

¹ Wayne Parson, “*Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*”, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta, 2005, hal 113

Muaranya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan secara langsung juga tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tertuang dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pemilihan bupati dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saat itu rakyat menjadi objek, kini telah menjadi subjek. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga memunculkan karakter demokrasi.

Pemilihan bupati melalui Pilkada di Kabupaten Jepara dan Pati secara langsung sudah dua kali terjadi. Kali pertama untuk Kabupaten Jepara pada 2011 dan Kabupaten Pati 2012. Meski berbeda di periode pertama, tetapi pilkada kedua di dua kabupaten ini dibarengkan di Pilkada Serentak 2017. Pilkada ini telah usai. Meski Pemilihan Bupati Pati dan Jepara telah selesai, di pelaksanaannya sempat menyisakan ketidakpuasan dari calon bupati atau perwakilan masyarakat atas hasil Pilkada.

Seusai penetapan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon bupati yang meraih suara yang kalah di Kabupaten Jepara mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu juga perwakilan masyarakat di Kabupaten Pati mengajukan gugatan atau permohonan ke MK. Kedua pihak yang kalah itu

merasa ada dugaan ketidakberesan secara sistematis dalam pelaksanaan hingga penetapan hasil Pilkada.

Secara umum saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati dan Jepara yang digelar 15 Februari 2017 berlangsung tenang, damai, dan lancar. Gesekan antarmasyarakat atau antarkelompok tidak terjadi. Kekacauannya tidak tampak. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Meski calon yang dipilih mereka berbeda-beda.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Pati di Pilkada Pati, pasangan Haryanto-Saiful Arifin meraih 519.675 suara atau 75 persen suara dari total 697.437 suara sah. Pasangan yang didukung delapan partai politik ini tidak memiliki lawan pasangan. Lawannya, hanya kotak kosong. Namun, kotak ini mampu memperoleh dukungan sekitar 25 suara atau 177.762 suara.

Kemenangan yang diraih pasangan Haryanto-Saiful Arifin tidak berjalan mulus. Seusai perhitungan KPU manual melawan kotak kosong yang tergabung Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) mengajukan permohonan ke MK. Gugatan ini teregister di MK dengan nomor: 41/PHP.BUP-XV/2017.² Mereka menggandeng aktivis Kontras Haris Azhar sebagai kuasa hukum.

Gugatan ini diajukan karena menemukan dugaan pelanggaran HAM dan politik uang yang terstruktur dan masif oleh paslon serta beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada.³ Gugatan AKDPP terhadap perselisihan hasil pemilu (PHP) ini ada tiga hal penting yang masuk dalam materi.

² <http://jateng.tribunnews.com/2017/03/16/mengejutkan-ini-alasan-relawan-kotak-kosong-ajukan-gugatan-ke-mk-terkait-hasil-pilkada-pati-2017>, 10 Mei 2017

³ [http://seputarmuria.com/2017/03/13/gugatan-relawan-kotak-kosong-diregistrasi-mk/10 Mei 2017](http://seputarmuria.com/2017/03/13/gugatan-relawan-kotak-kosong-diregistrasi-mk/10-Mei-2017)

Kajian itu menyangkut *legal standing* pemohon, tenggat waktu pengajuan permohonan, dan ambang batas selisih hasil perolehan suara yang dipersyaratkan di kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara PHP di MK alias yang mempunyai *legal standing* adalah peserta pemilihan, yakni pasangan calon atau pemantau pemilihan yang lembaganya teregistrasi di KPU kabupaten/kota. Pengajuan permohonan perkara PHP berdasar pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2017 paling lambat tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Batas ambang selisih hasil pemilihan yang dapat disengketakan diatur di pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut, persentase selisih suara pilkada di daerah dengan penduduk lebih dari satu juta jiwa adalah 0,5%. Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa.⁴

Melihat pertimbangan diatas itu di hasil sidang gugatan Relawan Kotak Kosong ditolak oleh majelis hakim MK. Gugatan itu dinilai tidak memenuhi tenggat waktu pengajuan gugatan. MK juga menolak gugatan relawan kotak

⁴ <http://seputarmuria.com/2017/03/13/gugatan-relawan-kotak-kosong-diregistrasi-mk/>, 10 Mei 2017

kosong karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum kuat sebagai pemohon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHP) Pilkada Pati.

Putusan itu dibacakan majelis hakim MK beranggotakan tujuh hakim dan dipimpin Arief Hidayat dengan nomor perkara PHP Nomor 41-Kab Pati. Majelis menolak gugatan pemohon dengan pertimbangan tidak memenuhi tenggat waktu. Penggugat dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2017 dapat mengajukan materi gugatan rentang waktu, Kamis, 23 Februari 2017; Jumat, 24 Februari 2017; dan paling lambat Senin, 27 Februari 2017. Pemohon mengajukan materi gugatan pada Selasa, 28 Februari 2017 lalu. Eksepsi termohon yang lain terkait ambang batas 0,5 perolehan suara dan *legal standing* pemohon PHP secara otomatis diterima.⁵ Adanya putusan MK itu membuat pasangan Haryanto-Saiful Arifin ditetapkan bupati dan wakil bupati Pati Terpilih. KPU Pati menyampaikan hasil Pilkada Pati 2017 itu kepada DPRD Pati.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK dan penetapan pemenang oleh KPU menandai berakhirnya seluruh tahapan pesta rakyat tersebut. Hasil penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Pati dengan Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 dari dewan memberikan pengusulan pengangkatan dan pelantikan Haryanto-Saiful Arifin kepada Mendagri melalui gubernur Jawa Tengah.⁶

Gugatan juga terjadi atas hasil Pilkada di Kabupaten Jepara. Pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara yang digelar 15 Februari 2017 itu dimenangkan pasangan Marzuqi-Andi yang didukung satu partai politik, PDIP. Pasangan nomor

⁵ “Radar Kudus”, 5 April 2017, hlm 1

⁶ “Radar Kudus”, 8 April 2017, hlm 1

2 ini meraih 319.837 suara atau 51,25 % dari suara sah. Pasangan Subroto-Nuryahman yang didukung banyak partai memperoleh suara 304.256 suara atau 48,75 % dari suara sah.⁷

Perolehan suara itu membuat Subroto-Nur Yahman tidak puas. Pasangan yang diusung koalisi besar ini mengajukan gugatan ke MK pada tanggal 24 Februari 2017. Gugatan dengan akta pengajuan permohonan pemohon Nomor 10/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku register perkara konstitusi dengan Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017. Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jepara yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Jepara nomor 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

MK memeriksa dan mengadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Berdasarkan *legal standing* pemohon, gugatan Subroto-Nur Yahman ditolak karena tidak memenuhi syarat. Amar putusan sengketa Pilkada Nomor 2/PHP.BUP.XV/2017 itu dibacakan oleh Ketua MK Arif Hidayat didampingi delapan hakim MK lainnya. MK menilai, Sulaiman tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf d karena selisih suara sekitar 2,5 persen. Gugatan itu bisa dilakukan jika selisih suara maksimal 0,5 persen.

Putusan MK itu menguatkan SK KPU Jepara Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Pilbup Jepara 2017. Calon terpilih Ahmad Marzuqi-Dian

⁷ https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/jepara, 10 Mei 2017

Kristiandi pada Pilkada 2017 diusulkan ke DPRD Jepara. Pelaksanaan pilkada ini dinilai masih kekurangan. Subroto menempuh jalur hukum lain. Jalan yang ditempuh melaporkan dugaan pelanggaran ke DKPP maupun PTUN.⁸

KPU Jepara telah mengusulkan ke DPRD Jepara. Usulan itu disampaikan ke mendagri melalui gubernur Jawa Tengah. Pasangan Ahmad Marzuqi-Andi Kristiandi telah dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 22 Mei di Aula Gedung Gradika Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Berdasar latar belakang penelitian yang ada tersebut, maka penulis memberikan judul dalam tesis ini Analisis Prospektif Pilkada Pasca Putusan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada di MK dari pasangan calon yang kalah di Kabupaten Jepara dan relawan kotak kosong di Kabupaten Pati?
2. Mengapa Para Pengugat mengajukan gugatan atas Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada Jepara dan Pati di MK?
3. Bagaimana analisis prospektif Para Pengugat pasca putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses demokratisasi?

⁸ “Radar Kudus”, 4 April 2017, hlm 1

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini sebagai berikut :

C.1. Tujuan Praktis

- a. Mendeskripsikan proses munculnya gugatan dari pasangan calon yang kalah di Pilkada Jepara dan ketidakpuasan relawan kotak kosong atas hasil Pilkada Pati di MK;
- b. Mendeskripsikan proses pengajuan Para Pengugat atas hasil Pilkada Jepara dan Pati di MK;
- c. Mendeskripsikan analisa prospektif para pengugat pasca putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses demokratisasi.

C.2 Tujuan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum, khususnya di bidang politik hukum;
- b. Untuk menambah wawasan dalam kebijakan publik, khususnya di bidang analisis kebijakan publik.

D. TINJAUAN PUSTAKA

D.1. Kerangka Konseptual

a. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih pemimpin. Pemilihannya secara langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemimpin ini

dipilih oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pilkada ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur atau bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota. Pemilihan ini tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi oleh UU. Di antaranya UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, dan UU Nomor 6 Tahun 2016. Pelaksanaannya diadakan setiap lima tahun sekali.

Pentingnya pemilihan ini, *pertama*, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. *Kedua*, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.⁹

Pemilihan umum ini sebagai momentum penting pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan periode berikutnya secara berkala. Pentingnya pilkada bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dapat dilihat dari penegasan asas-asas pelaksanaan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b. Gugatan

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main

⁹ Syafran Sofyan, Permasalahan Dan Solusi Pemilukada, [http : //www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html](http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-pemilukada.html), 20 September 2013.

hakim sendiri (*eigenrichting*). Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Cirinya, perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa yang terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak bersifat partai (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.¹⁰

c. Demokratisasi

Demokrasi dalam bahasa Inggris *democracy*, secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan.¹¹ Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*”, yaitu sistem pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, baik yang bersifat langsung maupun dengan sistem perwakilan.¹²

Joseph Schumpeter justru memandang dari sisi lain, demokrasi merupakan metode politik.¹³ Dahl juga memandang demokrasi sebagai sebuah sistem politik.¹⁴ Ghofur memiliki arti luas tentang demokrasi merupakan sebuah sistem politik dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di suatu negara, bukan raja, bukan negarawan, atau sekelompok elit-elit tertentu.

¹⁰ <http://upipagow.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang.html>, 6 Mei 2017

¹¹ Eddi Wibowo dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, “*Kebijakan Publik Pro Civil Society*”, YPAPI. Yogyakarta, 2004, hlm 13

¹² Ibid hlm 13

¹³ Georg Sorensen, “*Demokrasi dan Demokratisasi*”, Penerjemah I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hlm 14

¹⁴ Ibid hlm 18

Secara lebih tajam demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan itu, secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹⁵

D.2. Kerangka Teori

a. Politik Hukum

Politik hukum dalam pandangan Prof. Sudarto sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶ Prof. Sudarto menyatakan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁷

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum

¹⁵ Georg Sorensen, “*Demokrasi dan Demokratisasi*”, Penerjemah I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hlm 61

¹⁶ Soedarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20.

¹⁷ Soedarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1986, hlm 151.

yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁸

Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.¹⁹

b. Legal System Theory

H. L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini-bagaimana memutuskan apakah itu valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain.²⁰

Subsistem yang kedua dalam sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*). Struktur merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Menurut Friedman :

*the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*²¹

¹⁸ Mahfud MD, “Membangun Politik Menegakkan Konstitusi”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 15.

¹⁹ Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, Alumni, Bandung, 1991, hlm 23.

²⁰ Lawrence Meir Friedman, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

²¹ Ibid hlm 14

Sistem hukum dalam teori Lawrence Friedman ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur dan substansi adalah komponen–komponen riil dari sebuah sistem hukum, namun semata–mata hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan mesin yang tengah bekerja. Struktur dan substansi bersifat statis sehingga memerlukan dunia sosial eksternal untuk memberikan nyawa dan realitas. Sistem hukum tidak terisolasi atau terasing, bergantung secara mutlak pada input–input dari luar.²² Akhirnya *legal cultures* merupakan kekuatan- kekuatan dari luar yang dapat menggerakkan struktur dan substansi hukum.

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah kekuatan–kekuatan sosial merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Sebuah masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan yang kadang menjangkau proses hukum atau tidak menjangkau bergantung pada kulturenya karena perilaku sebuah masyarakat bergantung pada penilaian mereka terhadap apa yang dianggap benar dan berguna.

c. Analisis Public Policy Theory

Analisis kebijakan menurut Fadillah, bagaimana kita dapat mengakomodir serangkaian pendapat dan argumentasi dari berbagai pihak yang ada dalam area kebijakan dalam membentuk suatu konstruksi pemahaman tertentu atas masalah kebijakan yang dianalisis.²³ Stuart S. Nagel mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai penentu alternatif terbaik dari kebijakan publik yang mampu

²² Lawrence Meir Friedman, “*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*”, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 17

²³ Fadillah Putra, “*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 33

memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan pemerintahan, dan yang akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan di dalam hubungan antara kebijakan dan tujuan.²⁴ Wildavsky memandang analisis kebijakan adalah susbidang terapan yang isinya tidak bisa ditentukan berdasarkan batasan-batasan disipliner, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampak sesuai dengan situasi masa dan sifat persoalan. Analisis kebijakan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Mengkaji “*problem*” dan hubungan antara kebijakan publik dengan *problem* tersebut.
- 2) Mengkaji isi kebijakan publik.
- 3) Mengkaji apa yang dilakukan dan tidak melakukan oleh pembuat keputusan dan kebijakan. Tertarik antara *input* dengan proses di area kebijakan.
- 4) Mengkaji konsekuensi kebijakan dari segi *output* dan hasilnya.²⁵

Merujuk kepada pendapat Wayne Parsons, secara umum terdapat dua kelompok pendekatan yang selama ini berkembang dalam analisis kebijakan publik. Parsons mengatakan dua kelompok pendekatan itu adalah²⁶

- 1) Analisis proses kebijakan (*policy process*);
- 2) Penggunaan teknik dan pengetahuan analitis untuk menentukan kebijakan.

²⁴ Fadillah Putra, “*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 1

²⁵ Wayne Parson, “*Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*”, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 30

²⁶ Ibid xii

Parsons juga menjelaskan bahwa analisis proses kebijakan adalah bagaimana cara mendefinisikan problem, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan sebagai kajian penggunaan teknik analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem, pengambilan keputusan, serta evaluasi dan implementasinya.

Bentuk dari analisis kebijakan publik merupakan hubungan antara komponen-komponen informasi-kebijakan dan metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk analisis kebijakan: analisis prospektif, analisis retropektif, dan integrasi.²⁷ Penelitian ini menggunakan analisis prospektif, yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan implementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi.²⁸

Model prospektif merupakan bentuk analisis kebijakan publik yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan “sebelum” suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut prediktif karena sering kali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari suatu kebijakan yang diusulkan.²⁹

Menurut Wiliam, ciri analisis adalah³⁰ :

²⁷ Willam N Dunn, “*Analisa Kebijakan Publik*”, Penerjemah Muhadir Darwis, Cetakan ke-3, PT Hadinindita Graha Widya, Yogyakarta, 2000, hlm 117

²⁸ Ibid 117-118

²⁹ Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*”, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 86

³⁰ Ibid hlm 117

- 1) Menggabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat dipilih dan dibandingkan;
- 2) Diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan;
- 3) Secara konseptual tidak masuk pengumpulan informasi.

Berdasarkan ciri ini akan menghasilkan jenis keputusan yang relatif berbeda bila ditinjau dari pendekatan teori keputusan. Teori keputusan dalam pendekatan analisis prospektif adalah teori keputusan normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan, menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung.

Keputusan yang akan diambil dalam analisis ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini bertujuan memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibandingkan alternatif lain. Dalam proses pemilihan alternatif tersebut harus mendasarkan pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada alasan yang masuk akal, bahwa suatu kebijakan dipilih atau ditolak. Metode seleksi kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.³¹

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

³¹ AG Subarsono, "*Analisis Kebijakan Publik*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 65

Rekomendasi kebijakan juga membahas berbagai model-model kebijakan yang dapat diambil oleh *policy maker* untuk memecahkan masalah kebijakan.³²

Penelitian ini menggunakan model perbandingan dengan membandingkan merupakan semua alternatif yang akan dievaluasi akan dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, kemudian dipilih salah satu alternatif kebijakan yang mempunyai nilai tertinggi. Penetapan kriteria perlu mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dari suatu kebijakan disamping pertimbangan seperangkat kriteria. Untuk memberikan nilai kuantitatif pada masing-masing kriteria diperlukan diskusi diantara pembuat kebijakan dengan melibatkan stakeholder untuk mencapai nilai yang disepakati. Besar nilai yang disepakati harus didasarkan pada fakta atau prediksi ke depan. Di antara masing-masing kriteria dapat diberi bobot yang sama atau berbeda, semua tergantung pada asumsi yang digunakan. Alternatif yang mendapat nilai terbesar adalah layak dipilih secara rasional.³³

d. Teori Social Engineering Roscoe Pound

Alternatif yang dipilih itu untuk pembaharuan hukum. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic*

³² AG Subarsono, "*Analisis Kebijakan Publik*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 66

³³ Ibid hlm 67

legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja³⁴, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu tampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop³⁵ dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougall.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, “*Hukum Masyarakat dan Pembangunan*”, Binacipta, Bandung, hlm 9

³⁵ Ibid hlm hlm 9

masyarakat.³⁶ Jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁷ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.³⁸ Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

³⁶ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, “*Pengantar Filsafat Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 74

³⁷ Soekanto Soerjono, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 135

³⁸ Ibid hlm 135

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument³⁹ yaitu *law as a tool social engineering*.

Penggunaan secara sadar tadi yaitu⁴⁰ penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

- 1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan.

Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

³⁹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 206

⁴⁰ Ibid hlm 206

- 3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

E. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini penulis menggunakan studi hukum, baik *law in the books* maupun *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga – lembaga sosial yang lain terhadap hukum sebagai *law in action*. Penelitian ini merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁴¹

Penelitian Analisis Prospektif Pilkada Pasca Putusan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dan Pati), peneliti juga menggunakan metode–metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai Analisis Prospektif Pilkada Pasca Putusan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dan Pati) merupakan penelitian hukum ini yuridis empiris. Pendekatan ini untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia, Jakarta, 1988, hlm 34

Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴² Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat lebih menekankan pada proses, maka penelitian ini menekankan penelitian kualitatif deskriptif. Pertimbangannya, menyajikan secara holistik dalam menganalisis suatu fenomena, memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit diketahui dan dipahami.

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Deskriptif ini bersifat analitis. Metode ini untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Hasil penelitian ditekankan

⁴² Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktik*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15

⁴³ Ibid, hal 16

⁴⁴ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 223

pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁴⁵

3. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini berkaitan sekali dengan proses numerisasi lengkap dimana semua anggota populasi lengkap diteliti. Penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dari populasi saja.⁴⁶

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang terkait dalam Analisis Prospektif Pilkada Pasca Putusan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dan Pati). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁷ Pertimbangan dalam memilih informan yang dianggap tahu, memahami dan dapat dipercaya, serta mempunyai hubungan dengan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, sampel dalam penelitian ini akan ditujukan untuk :

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

⁴⁵ Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 31

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia, Jakarta, 1988, hlm 46

⁴⁷ Ibid hlm 51

- b. Komisioner Panwaslu Kabupaten Jepara.
- c. Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara.
- d. Ketua tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Jepara dari partai politik pengusung.
- e. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- f. Komisioner Panwaslu Kabupaten Pati.
- g. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.
- h. Ketua tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pati dari partai politik pengusung.
- i. Relawan kotak kosong di Pilkada Pati.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian *socio-legal*, data yang diperlukan meliputi data primer, dan data sekunder.

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama, yaitu informan dalam penelitian. Untuk memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara (*interview*).

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut *interviewer*, sedang

pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewie* atau informan atau responden.⁴⁸

Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan yang terarah untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan dari informan. Adapun yang menjadi informan ialah sebagaimana yang tertera dalam Metode Penentuan Sampel.

- b. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber lain dan bukan informan langsung jadi. Untuk memperoleh data sekunder, dapat berasal dari dokumentasi, monografi, statistik, dan lain-lain yang dapat dijadikan sumber informasi dan data pelengkap.

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.⁴⁹ Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁵⁰

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan kepercayaan data. Data yang diperoleh diperiksa, diteliti untuk menjamin apakah dapat

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia, Jakarta, 1988, hlm 71

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002, hlm 206

⁵⁰ Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 133

dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan atau tidak. Data dirasa sudah cukup dan sesuai kenyataan, selanjutnya data tersebut disajikan.

Teknik triangulasi yang dipakai untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.⁵¹ Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Patton dalam Moleong, dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif, dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi tertentu dengan apa yang dikatakan sepanjang masa;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- e. Membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵²

Penelitian ini akan menggunakan validitas data membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara

⁵¹ Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Cetakan ke-17, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 178

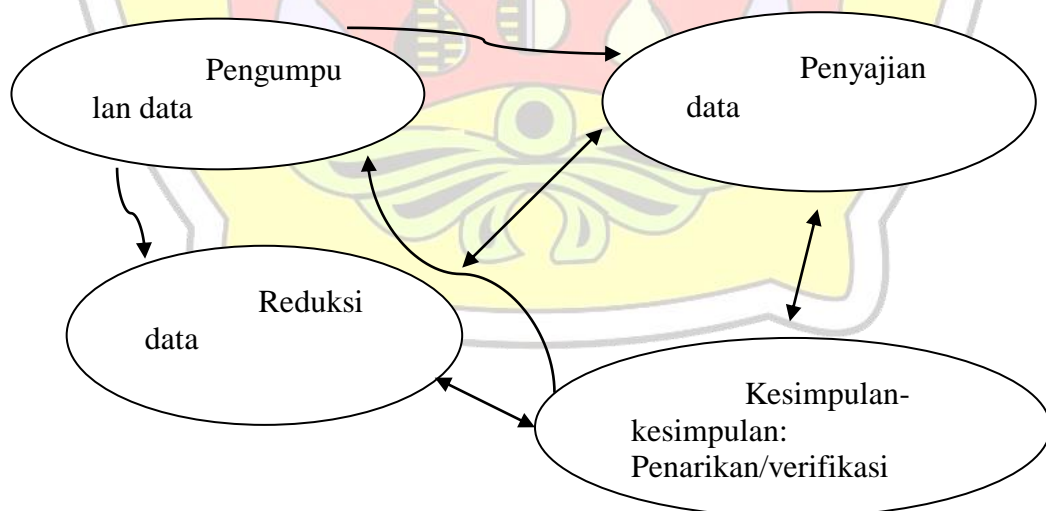
⁵² Ibid hlm 178

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Keterbatasan waktu yang menjadi alasan peneliti mengambil dua dari lima validitas data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, analisa penelitian kualitatif deskriptif. Model yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu siklus.⁵³ Bentuk peneliti ini bergerak di antara tiga komponen utama analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.

Pengumpulan data berakhir, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen utama analisis dengan menggunakan waktu tersisa dalam penelitian. Secara sederhana proses penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini⁵⁴:



⁵³ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cetakan ke-17, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 19

⁵⁴ Ibid, hlm 20

7. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada formulasi kebijakan dengan memberikan masukan atas berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pilkada. Penelitian ini menekankan pada identifikasi dan mendeskripsikan munculnya isu publik dan analisis prospektif format UU tentang Pilkada. Hal ini dapat dilihat dari aspek:

a. Munculnya Gugatan PHP Pilkada Jepara dan Pati

Aspek kajiannya meliputi:

- 1). Tuntutan dari pemohon
- 2). Penjelasan termohon
- 3). Penjelasan pihak terkait

b. Proses Gugatan PHP Pilkada Jepara dan Pati

- 1). Pengajuan dari pemohon
- 2). Penjelasan termohon
- 3). Penjelasan pihak terkait

b. Analisis pasca gugatan PHP Pilkada Jepara dan Pati di MK

- 1). Pandangan ke depan dari pemohon
- 2). Pandangan ke depan dari termohon
- 3). Pandangan ke depan dari pihak terkait